

Daftar Pustaka

Buku

- Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, (Bandung: Alumni Bandung, 2005)
- Bambang Hartoyo, Legalisasi Apostille Seluk Beluk, Manfaat dan Pelaksanaannya, (Yogyakarta: Bintang Semesta, 2022)
- Denny J.A. Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi Indonesia (Yogyakarta: LKIS, 2006)
- Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional “Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi”, (Bandung: Penerbit PT Alumni Bandung, 2011)
- G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1996, Cet-3)
- H. Salim dan H. Abdulah, 2007, Perancang Kontrak dan MOU, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
- Habib Adjie, Saksi perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, (Bandung: Refika Aditama, 2008),
- Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), (Bandung: Mandar Maju, 2009)
- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013)
- Herlin Budiono, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)

- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 2003)
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hirarki Norma Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2021)
- Komar Andasmita, *Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1991)
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian* (Bandung: Sumur Bandung, 1982)
- M.U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, (Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 1997)
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004)
- R. Soebekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pramadya Paramita, cet. Ke-8, 1987).
- R. Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Internusa, 2006)
- R. Soebekti, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990)
- Richard Brooke, *A Treatise on the Office and Practise of a Notary of England* (London: Sauders and Benning, Law Booksellers, 43 Fleet Street. 1838)
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008),
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: DinarGrafika, 2018),
- Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, cet. Ke 5, 1972),

Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional, (Keng Po, University of California, 1961)

Sudargo Gautama, Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, (Bandung; Alumni,1978)

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 1979)

Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 (Bandung: Alumni, 1994)

Sekretariat Kepaniteraan MA, Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno, (Jakarta: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2024)

Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat Serba-serbi Praktek Notaris, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000),

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Jurnal Nasional

Ahmad Haris Junaidi, “Urgensi dan Tantangan Indonesia dalam Akses Konvensi Apostille”, Jurnal RechtsVinding Vol 7, Nomor 2, Agustus 2018

Almi, A. A, “Mencederai Akses *Apostille* Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia”, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 2 No. 2, Jul-Dec, 2022.

Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015, hal 100

Dyota Rizky Elmanda Putra, Elan Jaelani, Akses Konvensi *Apostille* Tahun 1961 dalam mendukung Penyederhanaan Legalisasi Dokumen di Indonesia, (Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 2 No 9 Tahun 2024)

Indah dan Muhammad, “Keabsahan Surat Kuasa Khusus Yang Ditandatangani di Luar Negeri dalam Gugatan Perceraian”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 1 Tahun 2021. DOI: 10.34007/jehss.v5i1.1201

Pratiwi, Layanan Apostille: Peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Reformasi Legalisasi Publik (Jakarta: Balibangkumham Press, 2023)

Priskila Pratita Penasthika, “Urgensi Akses Bagi *Apostille* Convention Bagi Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015,” Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, ISSN: 1693-766X, Vol. 24, No. 2 (Agustus 2015)

Wiliam S dan Gunawan, “Anlisis terhadap Keabsahan Surat Kuasa WNI dari Luar Negeri Untuk Beracara di Pengadilan Indonesia”, Jurnal Suara Hukum, Volume 3 Nomor 2, September 2021.

Zaenul Abidin, “Kekuatan Hukum Surat Kuasa dari Luar Negeri yang Tidak Dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Indonesia”, Juornal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 5, No.1, Agustus 2022.DOI: 10.34007/jehss.v5i1.1201

Hasil Penelitian:

Hardelima Sitompul, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Legalisasi Dokumen Publik Pasca *Akses The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents 1961*”, Tesis,

Jakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2023.

Este Miranda, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Legalisasi Surat Kuasa Apostille”, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 19 Tahun 2020 tentang Layanan Legalisasi Tanda Tangan Pejabat pada Dokumen di Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 735)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Legalisasi *Apostille* pada Dokumen Publik yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Tahun 2022, Nomor 594)

Peraturan Menteri Luar Negeri No. 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 125)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 Tata Cara Legalisasi Dokumen Pada Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 897)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Convention Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3)

Kovenssi Internasional

The Hague Convention Abolishing The Requirement of Legalization for Foreign Public Documents 1961

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung R.I 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981 tertanggal 18
September

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby

Putusan Mahkamah Agung Nomor 708 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Online

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Luncurkan Layanan Apostille Kemenkumham Pangkas Proses Legalisasi
Dokumen.[http://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/
4481-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-
legalisasi-dokumen](http://bali.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/4481-luncurkan-layanan-apostille-kemenkumham-pangkas-proses-legalisasi-dokumen)

